

PERENCANAAN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Fadhiil Nabhaan¹, Anas Ardiansyah², Endin Mujahidin³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor
e-mail: 1Nabhaan.may@gmail.com

²Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor
e-mail: 2Anas.ardiansyah@gmail.com

³Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor
e-mail: 3endin.mujahidin@uika-bogor.ac.id

Abstract

Different systems, education needs material as a driving force like the economy in running a society, at least at least to revive the human resources involved in the institution. This article aims to look at the financial planning of Islamic education theoretically and what happens in the field. The method used in this research is library research and qualitative field data, financial management and financing of educational institutions can be interpreted as a series of activities to manage the finances of educational institutions ranging from planning, extracting cost resources, bookkeeping, spending, supervision and accountability and financial reporting of educational institutions so that the organisation or educational institution runs effectively and efficiently in carrying out the function of providing high-quality educational services. Even in Islam the Qur'an instructs us to be familiar with administrative activities and Bookkeeping.

Keywords: Finance; Planning; Education; Islam.

Abstrak

Different systems, education needs material as a driving force like the economy in running a society, at least at least to revive the human resources involved in the institution. This article aims to look at the financial planning of Islamic education theoretically and what happens in the field. The method used in this research is library research and qualitative field data, financial management and financing of educational institutions can be interpreted as a series of activities to manage the finances of educational institutions ranging from planning, extracting cost resources, bookkeeping, spending, supervision and accountability and financial reporting of educational institutions so that the organisation or educational institution runs effectively and efficiently in carrying out the function of providing high-quality educational services. Even in Islam the Qur'an instructs us to be familiar with administrative activities and Bookkeeping.

Keywords: Finance; Planning; Education; Islam

1. PENDAHULUAN

Perencanaan Keuangan Pendidikan merupakan salah satu unsur pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, pendidikan itu

sendiri sebetulanya hampir sama seperti sebuah perusahaan, tidak hanya berisikan guru, namun ada ahli keuangan, teknologi bahkan arsitektur. Keuangan dalam pendidikan sendiri seperti bensin

pada mobil atau makanan pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai penggerak pada sistem suatu kegiatan, khususnya pendidikan.

Di lapangan masih banyak sekali perencanaan keuangan pendidikan di sekolah yang diadakan seadanya, sehingga pada berjalannya sebuah instansi ditengah jalan menjadi tidak begitu baik. Padahal perencanaan keuangan pendidikan yang baik akan berimbas pada kualitas layanan yang diberikan oleh instansi tersebut beserta unit unitnya. Disisi lain, perencanaan dan manajemen keuangan pendidikan yang kurang baik juga bisa menjadi celah bocor pengambilan dana pendidikan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan banyak kerusakan. Misal anggaran pendidikan dari negara sebetulnya besar sekali, yang harusnya dampaknya tidak ada lagi orang yang tidak bisa bersekolah, namun sayang beribu sayang karena keserakahan suatu oknum dampaknya begitu besar.

Meskipun secara eksplisit pembiayaan atau dana pendidikan tidak termasuk dalam faktor-faktor pendidikan, akan tetapi persoalan ini merupakan hal yang sangat mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dari pembiayaan yang baik akan menghasilkan sarana prasarana pendidikan yang baik, dari sini akan memudahkan peserta didik dalam belajar dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan, bahkan dari meningkatnya mutu pendidikan itu akan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik di masa mendatang.

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi keberlangsungan proses instansi pendidikan. Salah satu aspeknya ialah aspek keuangan dan pembiayaan. Karena aspek ini salah satu komponen produksi yang menentukan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan memerlukan biaya. Komponen keuangan ini harus dikelola dengan sebaik baiknya. Lembaga yang tidak mampu mengelola anggaran dana pendidikan bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaannya. Menurut Muhtar, perencanaan dibutuhkan agar pengelolaan instansi dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkualitas.

Faktor penting yang berperan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas ialah dengan melalui pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas itu meningkatkan kualitas bangsa. Untuk mewujudkan

sistem pendidikan yang baik, diperlukan strategi dan upaya diantaranya masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan terkait efisiensi dan efektivitas ialah mengenai pembiayaan

“Uang memang bukan segalanya, tapi jangan lupa, segalanya butuh uang, termasuk dalam mengelola lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga tidak mungkin mencapai target tinggi, menjadi yang terbaik, menjadi yang bermutu, memiliki reputasi bagus dan banyak lagi label prestasi yang ingin dicapai.

Pedoman hidup umat Islam ialah Al-Qur’an dan hadist yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspeknya yaitu keuangan. Dalam Qur’an masalah pembiayaan pendidikan secara tersirat disampaikan dalam firman Allah Q.S. Al-Mujadillah ayat 12-13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَبْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؕ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأَذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؕ

(12) Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (ingin) melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Akan tetapi, jika kamu tidak mendapatkan (apa yang akan disedekahkan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (13) Apakah kamu takut (menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadillah ayat 12-13)

Menurut riwayat Ibnu Abi Hātim dari Ibnu ‘Abbās, diterangkan bahwa para sahabat banyak yang ingin bertanya kepada Rasulullah saw, sehingga membebani. Untuk meringankan bebannya, Allah menurunkan ayat ini, dengan memerintahkan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah.

Ayat ini menggambarkan bahwa dalam pendidikan membutuhkan anggaran dana, sehingga untuk memperoleh pendidikan bukan suatu hal yang gratis, namun membutuhkan dukungan finansial. Pada ayat ini Allah Swt memberikan persyaratan bagi kaum muslim yang hendak bertanya atau belajar pada Rasulullah Saw, untuk mengeluarkan sedekah bagi fakir miskin. Hal ini diasumsikan sebagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan dalam upaya seseorang mencari Ilmu. Karena didalam hal tersebut juga terdapat berbagai manfaat bagi kehidupan.

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan membahas terkait perencanaan keuangan pendidikan Islam secara umum dengan harapan lebih menilik lagi banyak pengetahuan terkait perencanaan keuangan pendidikan, tentunya penulis menyadari masih banyak sekali kesalahan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan ini, maka dari penulis memohon maklum, ridho dan ikhlas atas hal tersebut.

2. KONSEP PERENCANAAN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Wiyanto, Muhamad Idrus (2021) Jurnal Perencanaan mencakup pada empat unsur yaitu adanya tujuan yang harus dicapai, adanya strategi untuk mencapai tujuan, sumber daya yang dapat mendukung dan implementasi setiap keputusan. Enoch dalam Anggraini dan Nasriah menjelaskan bahwa perencanaan ialah proses mempersiapkan hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kalau menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai, dengan efektif dan efisien.

Perencanaan sendiri ialah langkah awal untuk mengidentifikasi semua hal yang dibutuhkan, perencanaan berguna untuk menentukan apa, kapan dilaksanakan, dimana, dan bagaimana cara melaksanakannya. Perencanaan harus realistis, sesuai dengan kapasitas sarana, daya dan tenaga, serta dana dan waktu yang tersedia. Perlu adanya koordinasi dalam perencanaan, dan harus memperhatikan cakupan serta sarana atau volume kegiatan sekolah yang kompleks. Perencanaan harus memperhatikan pengalaman yang ada,

pengetahuan dan intuisi, serta mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik. Perencanaan harus bersifat luwes dan fleksibel. Perencanaan harus mampu menyesuaikan segala kemungkinan yang luput dari perhatian sebelumnya tanpa harus membuat revisi. Perencanaan yang baik dan lengkap adalah perencanaan yang dibuat setelah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan perencanaan yang disusun dengan baik, maka setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan lebih bermutu dan berjalan dengan teratur. Pentingnya fungsi perencanaan sesuai firman Allah Swt dalam Q.S. al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْتَابٍ
وَآتُوا اللَّهَ مِنْ اللَّهِّ حَيْبًا لِّمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Hasyr [59]:18)

Kemudian keuangan atau dalam arti lain biaya pendidikan menurut Fattah dalam Nursalimah ialah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Biaya pendidikan ialah jumlah uang yang dihasilkan dan di belanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah / madrasah Keuangan berasal dari kata dasar uang. Dalam Organisasi, uang itu merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki disamping sumber daya lain seperti manusia, bahan bahan, mesin, metode dan pasar. Sumber daya keuangan bisa berupa uang dalam arti sesungguhnya, yaitu uang tunai, tapi bisa juga berupa harta yang serupa dengan mata nilai uang tersebut, baik bergerak atau tidak bergerak. Manajemen keuangan sendiri bisa dibidang seni merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengawasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Keuangan dan Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan keuangan juga merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi perlengkapan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran disekolah.

Perencanaan keuangan sendiri bisa dicermati sebagai suatu kegiatan yang merencanakan

penganggaran, pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu instansi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dan menunjang pengelolaan pendidikan itu sendiri. Secara umum perencanaan keuangan adalah tujuan hidup seseorang yang dilakukan melalui sebuah perencanaan keuangan yang disusun sehingga terbentuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan keuangan dapat terbentuk mulai dari pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, perencanaan pendidikan anak, pension, dan jaminan hari tua. Untuk dapat menyusun sebuah perencanaan keuangan diharapkan usaha kecil menengah mampu mengerti tentang perencanaan keuangan tersebut.

Walaupun sama sama uang, Konsep pengelolaan keuangan pendidikan berbeda dengan manajemen keuangan perusahaan yang berorientasi profit atau laba.

Perencanaan atau pengelolaan keuangan pendidikan ialah sejumlah kegiatan yang tersusun secara sistematis mulai dari perencanaan, penggunaan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung jawaban dan pelaporan agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kalau menurut David wijaya, manajemen keuangan ialah serangkaian kegiatan mengatur keuangan mulai dari perencanaan pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Perencanaan Keuangan pendidikan juga bisa disinonimkan sebagai pembiayaan pendidikan yang mana menurut Fattah ialah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Perencanaan Keuangan Pendidikan bisa juga disebut pembiayaan pendidikan yang maknanya ialah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang ataupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dituju tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan keuangan ialah dengan merencanakan sumber dana yang akan digunakan dalam kegiatan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan sendiri dibutuhkan untuk tercapainya keefektifan dalam

penggunaannya dan menghindari pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Anggaran Pendidikan

Anggaran pada umumnya terdiri dari dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga pendidikan dari berbagai sumber. Baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan lain lain. Sedangkan pengeluaran ditentukan dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Penganggaran adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan tata kelola keuangan pendidikan. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 1 ayat 39 mendefinisikan anggaran pendidikan ialah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

dari berbagai penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pendidikan ialah aktivitas perencanaan dana yang diniatkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. dalam proses lanjutannya harus dikelola dan diawasi dengan baik dengan manajemen keuangan pendidikan.

3. Tujuan, Ruang Lingkup dan Fungsi Manajemen Perencanaan Keuangan Pendidikan

Tujuan perencanaan keuangan pendidikan ialah: Meningkatkan penggalan sumber biaya lembaga pendidikan, Menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan instansi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, meminimalkan penyalahgunaan anggaran, mengatur dan-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal menunjang terjadinya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran, membantu sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji,

meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Menurut Abdullah dalam Susanti Dkk, Perencanaan keuangan bertujuan untuk mengelola sumber dana yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan sumber daya dan perencanaan yang ada.

Adapun manfaat dari perencanaan keuangan disertai manajemennya ialah; Adanya pelaporan keuangan yang bisa dijadikan acuan evaluasi, Keuangan bisa diaudit dan diperiksa agar menghindari terjadinya penyimpangan, adanya evaluasi pada sistem keuangan lembaga, adanya penyimpanan keuangan untuk mengamankan dana tersebut, adanya pencarian keuangan dan eksploitasi sumber dana yang ada untuk pemasukan, mencapai tujuan pendidikan dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Adapun prinsip-prinsip dari perencanaan keuangan pendidikan, Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Bab IV tentang pendaan pendidikan pasal 59, prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan ialah, pertama, prinsip keadilan. Yaitu tidak membedakan siapapun dalam memberikan pelayanan pendidikan yang luas dan merata untuk peserta didik, baik dari latar belakang, agama, suku, ras, jenis kelamin, kemampuan dan status sosial ekonominya. Yang kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu memberikan arahan adanya keterbukaan dan bebas dari kecurangan dan manipulasi. Konsep pencatatan atau akuntansi keuangan sendiri secara teratur sudah sejak lama dalam Al-Qur'an pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282, Ayat ini menjelaskan pentingnya pencatatan atau penulisan dengan benar, untuk setiap muamalah atau transaksi yang dilakukan. Hal ini juga berfungsi untuk memperkuat isi kesepakatan danantisipasi terjadinya perselisihan, lupa dan kebingungan di hari kemudian. Kemudian prinsip yang ketiga ialah Prinsip efisiensi, yaitu merupakan prinsip pemberian akses pelayanan pendidikan yang meluas dan merata dengan pendistribusinya yang dilakukan dengan efisien.

Diantara prinsip perencanaan keuangan diantaranya; 1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) efektivitas, 4) efisiensi sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan, 5) peningkatan partisipasi stakeholder pendidikan, 6) hemat dan tidak mewah, 7) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,

program / kegiatan. Transparansi sendiri ialah keterbukaan dalam mengelola suatu keuangan, yang mana pertanggung jawabannya jelas dan bisa mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya. Akuntabilitas ialah berarti penggunaan uang di lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas ialah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan sesuai dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Efisiensi ialah perbandingan antara input dengan output keuangan itu sendiri, atau dalam arti lain, uang yang masuk dan uang yang dikeluarkan sudah membuat tercapainya tujuan pendidikan atau memberikan layanan pendidikan yang baik.

Adapun prinsip perencanaan keuangan menurut lembaga pendidikan Islam ialah; pertama, Prinsip tolong menolong (muawwanah) prinsip ini memberikan gambaran akhlak seorang muslim untuk menolong orang-orang yang kurang mampu, sehingga terjadi pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Praktiknya kurang lebih mirip seperti subsidi atau iuran silang. Prinsip ini ada dalam Qur'an surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Ma'idah [5]:2)

Kemudian yang kedua ada prinsip kerjasama (Syirkah) dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan sesuai tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Kemudian ketiga, prinsip Ibadah yaitu semua kegiatan harus dikembalikan kepada prinsip bahwa hal tersebut dilakukan semata karena ibadah kepada Allah Swt. Dengan mengingat bahwa yang dikerjakan dalam kegiatan perencanaan keuangan dan penyusunan anggaran adalah ibadah dalam hubungannya dengan Allah Swt, maka bagi seorang muslim akan berusaha mengikuti perintah dan ketetapan Allah sehingga anggaran yang disusun akan akuntabel

dan transparan, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan.

UUD 19945 dan Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, anggaran pendidikan harus diupayakan untuk ditingkatkan mencapai minimal 20% dari APBN dan APBD karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, terdapat beberapa landasan dalam penyusunannya. Pertama berdasarkan Al-Qur'an. Diantara firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan perencanaan dan pengelolaan keuangan ialah pada QS. Al-An'am ayat 152 tentang prinsip keadilan Q.S. al-Baqarah ayat 282 terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, Q.S. al-Maidah ayat 2 terkait prinsip tolong menolong, Q.S. Shad ayat 24 terkait prinsip kerja sama atau syirkah, dan Q.S. al-Imran ayat 64 terkait prinsip ibadah. Berkaitan dengan fungsi perencanaan keuangan, terdapat dalam Q.S. Al-Hasyir ayat 18, dan ayat-ayat al-Qur'an lainnya. Kedua, berlandaskan hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Prinsip Keadilan, dalam kitab al-Jami' al-Shahih tentang Keutamaan Imam yang Adil. Ketiga, berlandaskan ijthihad. Termasuk ijthihad di antaranya yaitu hukum positif yang berlaku pada bidang tersebut, yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah secara serius mengatur masalah perencanaan dan pengelolaan keuangan pendidikan dengan mengeluarkan beberapa landasan peraturan. Landasan peraturan tersebut antara lain adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 2 tentang ketersediaan dana pendidikan untuk siswa berumur tujuh hingga lima belas tahun, Pasal 12 ayat 1 tentang ketersediaan beasiswa pemerintah bagi peserta didik yang berprestasi namun orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, dan Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 tentang program wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia enam tahun. Terdapat pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa masalah pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber untuk pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi. Investasi merupakan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Ada 3 sumber dana secara umum, yaitu : dana pemerintah dari Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD. Dana Masyarakat yang berasal dari masyarakat atau donatur, kemudian Dana swadaya yang berasal dari pihak sekolah secara mandiri.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, turunannya dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari dulu sampai sekarang menggunakan istilah anggaran pendidikan (education budget).

Adapun menurut Rusdiana sumber-sumber baiya pendidikan ialah sebagai berikut; pertama ada Dana pemerintah, meliputi dari sektor pajak dan non pajak bahkan sampai investasi dan BUMN, kemudian dari Iuran sekolah dan sumbangan secara sukarela dari masyarakat.

Menurut Muhammad terdapat beberapa lembaga yang didirikan pada masa Rasulullah Saw, diantaranya : Baitul Maal yang merupakan lembaga ekonomi keuangan yang dikenal luas pada masa awal kejayaan ekonomi Islam, pendirian baitul maal didasari atas kejadian setelah perang Badar yang menjadi asbab turunnya Firman Allah Q.S Al-Anfal ayat 1 yang menetapkan beberapa bagian Ghanimah yang banyak dan bisa menjadi perebutan itu menjadi haknya Allah dan Rasul untuk dibagikan kepada masyarakat demi kemaslahatan kaum muslimin. Dari hal tersebut nanti dibentuklah struktur administrasi yang bergugas mengurus masalah publik, Baitul Maal memiliki kesamaan dengan kas negara yang ada pada saat ini. Yang kedua ialah Wilayahtul Hisbah, merupakan sistem pengawasan dan kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi. Pembentukan baitul maal dan wilayatul hisbah memberikan hikmah dan pelajaran bagi umat selanjutnya bahwa pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah saw sudah diterapkan dengan perencanaan yang matang.

Segala aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan negara pada masa Rasulullah saw memberikan pelajaran tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip dan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan seperti yang diterapkan pada lembaga pendidikan Islam saat ini.

Ada tiga kelompok utama kajian proses perencanaan keuangan pendidikan, yang pertama Budgeting, kemudian Accounting, selanjutnya auditing.

a. Penyusunan / Perencanaan Anggaran (Budgeting)

Penyusunan / perencanaan anggaran ialah kegiatan identifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan pada penampilan operasional yang bisa diukur, menganalisa alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Adapun Budgeting Pendidikan ialah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uanga digunakan sebagai pedoman dalam Lembaga kurun waktu tertentu. Kalau menurut Lipham, Perencanaan anggaran ialah penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan (Perencanaan anggaran, Mempersiapkan anggaran, Mengelola pelaksanaan anggaran, menilai pelaksanaan anggaran)

Penyusunan anggaran Pendidikan sendiri perlu memperhatikan sumber keuangan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan itu sendiri. Sumbernya bisa dari Pemerintah, Orang tua / peserta didik, dan masyarakat.

Yang perlu diperhatikan ialah, Anggaran belanja Pendidikan diprioritaskan yang dibutuhkan saat ini, kemudian Merevisi peraturan dan input lainnya yang relevan dengan merancang sistem yang efektif, kemudian memonitor secara terencana secara berkesinambungan

b. Pembukuan (Accounting) Pembukuan

Pembukuan ialah kegiatan pengurusan keuangan Pendidikan meliputi dua hal, yang pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak

menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan.

Diantara kegiatan accounting ialah sebagai berikut :

- 1) Buku Pos (Vatebook) yang memuat informasi jumlah dana yang tersisa dan mencatat pemasukan dan pengeluaran, sehingga bisa dipantau apakah boros atau tidak
- 2) Faktur, yaitu lembaran lepas yang dapat diarsipkan, atau sekarang lebih dikenal dengan nota
- 3) Buku Kas, yaitu mencatat rincian penerimaan dan pengeluaran keuangan serta sisa saldo pada hari yang sama
- 4) Lembar Cek, ialah alat bukti bahwa pembayaran yang dilakukan ialah sah
- 5) Jurnal, untuk mencatat arus kas (Cash Flow) karena seluruh transaksi dan akuntansi keuangan semuanya di catat di jurla sebelum diklasifikasikan ke buku besar
- 6) Buku besar, muatan data keuangan yang isinya informasi dari Jurnal pada setiap akhir bulan
- 7) Buku kas Pembayaran Sekolah, catatan tentang pembayaran uang sekolah
- 8) Buku Kas Piutang, berisi daftar catatan orang yang berhutang kepada sekolah menurut jumlah yang berhutang
- 9) Neraca Percobaan, Untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggung jawaban keuangan Lembaga Pendidikan secara cepat

c. Pemeriksaan (Auditing)

Pemeriksaan (Auditing ialah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak pihak yang berwenang. Ada beberapa jenis pemeriksaan audit, pertama itu pemeriksaan (audit) laporan keuangan, kedua pemeriksaan operasional yang merupakan penelaahan atas bagian maupun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. uran tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.

Suatu audit ketaatan pada lembaga pendidikan, dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi pendidikan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga.

Contohnya peninjauan standar biaya umum (SBU), pemeriksaan perjanjian dengan pihak lain (mitra kerja, pihak perbankan atau para kreditor).

d. Pertanggung Jawaban

Kegiatan Pelaporan dapat dilakukan secara periodik seperti laporan tahunan dan laporan pada masa akhir jabatan pimpinan. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini juga bagian dari pengawasan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan Hal ini dilakukan mulai dari proses pengeluaran, pos anggaran pembelanjaan, perhitungan dan perhitungan dan penyimpangan barang oleh petugas yang ditunjuk. Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan lembaga Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan, ditujukan kepada antara lain: a) kepala dinas pendidikan, b) kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), 3) dinas Pendidikan di kecamatan dan lainnya.

Suatu Lembaga Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari masalah keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagian dari organisasi yang harus dikelola secara rinci dan teratur dalam sebuah Lembaga Pendidikan.

No	Bahasan / Terkait	FHQ Al-Madinah
1	Lembaga Melakukan perencanaan & pengelolaan Keuangan	Ya, Ada perencanaan keuangannya
2	Cara Pengelolaan	Perencanaan pengelolaan keuangannya ada tapi belum terlalu mendetail, Karena lembaga pendidikan Non Formal, karena di semester yang akan datang pun belum tahu berapa jumlah santri yang ada dan anggaran yang dibutuhkan. Tapi tiap tahunnya Lembaga tersebut mengadakan perencanaan anggaran dana untuk Kegiatan pembelajaran untuk satu tahun kedepannya dan setiap 1 Tahun sekali, di setiap akhir tahun Lembaga ini merencanakan kegiatan selama setahun bahkan yang ada di luar program FHQ, namun keseluruhan dari masjid FHQ ini punya standar perjalanan kelas yaitu dengan 8 santri, sudah bisa berjalan
3	Proses Tahapan Budgeting, accounting dan auditing	Budgeting ada, Accounting dicatat, Auditing dan Laporan ada tapi bukan tim FHQ yang melaksanakannya, tim FHQ dan DKM Masjid Al Madinah hanya memberi laporan kepada laporan keuangannya kepada tim keuangan Zona Madinah (yang menaungi masjid untuk saat ini). Nanti selanjutnya tim keuangan lah yang melakukan auditing
4	Yang melakukan Budgeting	Budgeting dilakukan oleh Pengurus FHQ Al-Madinah, Mudhir FHQ Al-Madinah, coordinator FHQ Al-Madinah, DKM staff program, dan manager masjid / ketua takmir masjid. Kegiatan dilakukan dengan diskusi dan musyawarah. Baru dilaporkan ke zona madinah, ke direktornya langsung, baik dalam forum
5	Waktu Pelaksanaan Budgeting	Akhir tahun – awal tahun
6	Yang melakukan Accounting	Tim Tatausaha FHQ Al-Madinah (Hanya Menerima) Lalu menyerahkan uang dan laporan kepada Tim DKM Masjid Al Madinah
7	Yang melakukan Auditing	Tim Keuangan Zona Madinah (yang menaungi masjid)
8	Alur Laporan Keuangan	Laporan keuangan alurnya dilakukan dari Tim Administrasi FHQ Al-Madinah (Penerima dan pencatatan uang masuk, selanjutnya uang dan laporan akan di berikan kepada DKM Staff Program yang mana memeriksa Kembali dan selanjutnya diserahkan kepada pihak tim keuangan zona madina (yang menaungi masjid Kemudian tim keuangan zona madina dompet dhuafa akan melakukan auditing Kepada Direktur Zona Madina, setelah dilakukan auditing, dibentuk laporan tahunan maka akan dilaporkan kepada Lembaga Dompot Dhuafa pusat.
9	Sumber dana	Ada tiga sumber keuangan FHQ Al-Madinah ini, yang pertama ialah dari santri dan Masyarakat berupa Infak bulanan. Untuk infak sendiri ditetapkan sebesar 75.000 – 100.000 – 150.000 sesuai kemampuan masing masing, apabila lebih dari itu dibolehkan, jikapun tidak bisa membayar maka dibolehkan untuk melakukan infak semampunya atau tidak membayar sama sekali. Infak ini ialah sumber dana terbesar dan menopang berjalannya kegiatan FHQ ini, kemudian sumber dana kedua berasal dari penjualan buku belajar, Al-Qur'an, mutaba'ah, mug, peci, atau souvenir lainnya. Kemudian sumber dana ketiga berasal dari Lembaga pusat Dompot Dhuafa. Yang mana dahulu menjadi penopang utama dalam menjalankan FHQ ini, namun seiring waktu FHQ diminta untuk semakin mandiri dan bisa menopang kegiatannya tanpa uang subsidi dari pusat. Gaji saat ini sudah mandiri,

Dari pembahasan di atas dan hasil wawancara Bersama ustad Ilham Maulana DKM Masjid Al Madinah divisi program dan layanan Masjid Al Madinah dompet dhuafa. FHQ Al Madinah merupakan singkatan dari Forum Halaqah Qur'an Al-Madinah yang mana merupakan salah satu program di Masjid Al Madinah yang dinaungi oleh lembaga Dompot Dhuafa

FHQ Al Madinah ini akan menjadi cikal bakal terbentuknya sekolah Al Quran. FHQ Al-madinah merupakan lembaga pendidikan non formal yang menyediakan fasilitas untuk belajar Alquran kepada Masyarakat, kelas yang disediakan tersedia untuk tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an sampai dengan yang sudah kelas lanjutan. jenjang pada FHQ Al Madinah terdapat beberapa kelas, yaitu kelas pra tahsin 1, pra tahsin 2, Tahsin 1, Tarkiz / Tilawah, Tahsin 2 A, Tahsin 2B, dan Takhossus. Para Pengajar yang di FHQ Al-Madinah adalah pengajar yang berkualitas. Salah satunya ialah Ust. H. Sudirman Lubis, Lc & Ust. H. Arif Rosyadi, S.Pd.I yang berasal dari mesir, Al-Hikam dan Pondok pesantren ternama di Jawa Timur.

Pada awalnya FHQ Al Madinah tidak dipungut biaya sama sekali dan di cover oleh lembaga pusat dompet dhuafa untuk penggajian guru dan persiapan kegiatan belajar mengajar, namun Seiring berjalannya waktu diadakan infaq yang fungsinya sebetulnya hampir sama dengan bayaran agar program FHQ Al Madinah ini bisa berdiri secara mandiri.

Dari hasil wawancara didapatkan data yang pertama lembaga FHQ Al Madinah melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Adapun tata cara pengelolaannya ialah perencanaan pengelolaannya mungkin tidak terlalu mendetail seperti sekolah Negeri pada umumnya, karena Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan non formal, kemudian sebab yang kedua ialah belum diketahui pada semester selanjutnya berapa jumlah santrinya dan anggaran yang dibutuhkan, namun untuk perencanaan anggaran dana untuk kegiatan pembelajaran FHQ sudah disiapkan selama 1 tahun sekali yang disatukan dengan anggaran program lainnya secara terpisah. FHQ sendiri sebetulnya punya standar perjalanan kelas yaitu dengan cukup 8 santri Insya Allah sudah bisa berjalan secara mandiri.

Kemudian, proses tahapan budgeting accounting dan Auditing, FHQ Al Madinah melakukan proses tersebut. Adapun budgeting itu ada dan dilakukan setiap tahunnya ketika di akhir tahun dan awal tahun, yang direncanakan untuk kegiatan satu tahun berikutnya. Kemudian untuk kegiatan accountingnya, dilakukan perhitungan uang masuk dan keluar yang dicatat hampir setiap diadakannya pelajaran (pada hari sabtu dan ahad).

sehari-hari pun ada salah satu atau dua staff yang berjaga sebagai tata usaha untuk menerima infaq (pemasukan), dan pengeluarannya pun dicatat dengan hati-hati.

Adapun proses accounting ini tersedia beberapa hal sebagai berikut: yang pertama ada kartu bayaran, bisa juga diproses dengan online melalui transfer ke nomor rekening Masjid Al Madinah yang kemudian nanti keduanya akan dicatat ke dalam buku kas. kemudian kas ini akan dimasukkan ke dalam buku besar sebagai pencatatan Siapa saja yang sudah membayar atau belum membayar. Kemudian untuk Auditing sendiri atau pertanggungjawaban, FHQ Al Madinah memberikan laporan harian dari tim Tata Usaha (penerima) kepada staf DKM program masjid. Kemudian dari staf DKM program masjid akan direkapitulasi kembali dan dicek ulang. Setelah itu dari Staf DKM Program masjid, laporan keuangan akan dilaporkan kepada staf keuangan Zona Madina (Zona Madina ini menaungi masjid). Kemudian dari pihak keuangan zona Madina akan dicek lagi laporannya, dan akan dilakukan Auditing kepada direktur zona Madina. lalu dari direktur zona Madina akan di forward laporannya kepada Lembaga Dompet Dhuafa Pusat.

Untuk aktivitas budgeting sendiri, yang terlibat dalam proses budgeting ialah : pengurus FHQ al-madinah yang terdiri dari; koordinator FHQ al-madinah, mudir FHQ al-madinah, wakil koordinator FHQ al-madinah, wakil mudir FHQ al-madinah, staf program DKM Masjid Al Madinah, manajer program atau ketua DKM Masjid Al Madinah. Proses Buggetingnya akan didiskusikan secara Bersama lalu hasil laporannya akan dilaporkan secara langsung kepada direktur zona Madinah secara langsung dalam forum.

Adapun untuk sumber dana, Ada tiga sumber keuangan FHQ Al-Madinah ini, yang pertama ialah dari santri dan Masyarakat berupa Infak bulanan. Untuk infak sendiri ditetapkan sebesar 75.000 – 100.000 – 150.000 sesuai kemampuan masing masing, apabila lebih dari itu dibolehka.n, jikapun tidak bisa membayar maka dibolehkan untuk melakukan infak semampunya atau tidak membayar sama sekali. Infak ini ialah sumber dana terbesar dan menopang berjalannya kegiatan FHQ ini, kemudian sumber dana kedua berasal dari penjualan buku belajar, Al-Qur'an, mutaba'ah, mug, peci, atau souvenir lainnya. Kemudian

sumber dana ketiga berasal dari Lembaga pusat Dompot Dhuafa. Yang mana dahulu menjadi penopang utama dalam menjalankan FHQ ini, namun seiring waktu FHQ diminta untuk semakin mandiri dan bisa menopang kegiatannya kegiatannya tanpa uang subsidi dari pusat. Gaji saat ini sudah mandiri.

Dari informasi diatas dapat dianalisis bahwa, untuk Lembaga FHQ ini perencanaan keuangannya sudah cukup baik namun masih belum terlalu detail karena, faktornya disebabkan Lembaga FHQ ini ada dibawah naungan sebuah Lembaga yaitu Masjid Al Madinah yang dinaungi Lembaga Dompot Dhuafa, kemudian Lembaga FHQ Al-Madinah ini ialah Lembaga pendidikan non-formal. Kemudian, karena dibawah naungan Lembaga yang tidak hanya bergerak dibidang Pendidikan, proses auditing keuangan pada Lembaga FHQ Al-Madinah ini cukup rumit dikarenakan berlapis lapis dari satu unit ke unit lain secara Panjang dan bertahap. Adapun untuk bagian tata usaha sudah cukup baik, namun sebaiknya perlu dirapihkan lagi dan ditambah karyawannya agar lebih rapih pencatatannya dan tidak dibebankan pada satu orang. Sejauh ini tanpa disadari perencanaan dan pengelolaannya sudah cukup baik meskipun tidak se-ketat sekolah. Dari sinilah perencanaan pengelolaan keuangan suatu Lembaga Pendidikan Islam sangat penting dan menjadi komponen yang vital dalam menunjang kemajuan Pendidikan Islam.

5. KESIMPULAN

Dari informasi diatas dapat dianalisis bahwa, untuk Lembaga FHQ ini perencanaan keuangannya sudah cukup baik namun masih belum terlalu detail karena, faktornya disebabkan Lembaga FHQ ini ada dibawah naungan sebuah Lembaga yaitu Masjid Al Madinah yang dinaungi Lembaga Dompot Dhuafa, kemudian Lembaga FHQ Al-Madinah ini ialah Lembaga pendidikan non-formal. Kemudian, karena dibawah naungan Lembaga yang tidak hanya bergerak dibidang Pendidikan, proses auditing keuangan pada Lembaga FHQ Al-Madinah ini cukup rumit dikarenakan berlapis lapis dari satu unit ke unit lain secara Panjang dan bertahap. Adapun untuk bagian tata usaha sudah cukup baik, namun sebaiknya perlu dirapihkan lagi dan ditambah karyawannya agar lebih rapih pencatatannya dan tidak

dibebankan pada satu orang. Sejauh ini tanpa disadari perencanaan dan pengelolaannya sudah cukup baik meskipun tidak se-ketat sekolah. Dari sinilah perencanaan pengelolaan keuangan suatu Lembaga Pendidikan Islam sangat penting dan menjadi komponen yang vital dalam menunjang kemajuan Pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, M. Yunus. "Manajemen Keuangan dan Pembiayaan di Madrasah". dalam Jurnal Ilmiah Islamic Resources. Vol. 19. No. 1. Juni 2022.
- [2] Arwildayanto. Lamatenggo, Nina. Sumar, Warni Tune. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. (Gorontalo: Widya Padjadjaran. 2017)
- [3] Kartika, Dewi. Mujahidin, Endin. Indra, Hasbi Dkk. "Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam". dalam Jurnal Idarah. Vol. 7. No. 1 . Januari – Juni 2023.
- [4] Matin. Fuad, Nurhattarti. Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014).
- [5] Nursalimah. Ritonga, Sangkot Idris. "Pembiayaan dan Efisiensi Pendidikan" dalam Jurnal Pena Cendikia. Vol. 5. No. 1. Tahun 2022.
- [6] Otoritas Jasa Keuangan. Perencanaan Keuangan: Seri literasi keuangan perguruan tinggi. (Jakarta: OJK. 2019)
- [7] Rusdiana. Wardija. Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah / Madrasah. (Bandung: 2013. Arsad Press)
- [8] Siswanto, Ely. Manajemen Keuangan Dasar. (Malang: Universitas Negeri Malang. 2021).
- [9] Susanti, Ari. Ismunawan. Pardi. Dkk. "Tingkat Pendidikan. Literasi Keuangan. dan Perencanaan Keuangan terhadap Perilaku Keuangan UMKM di Surakarta" dalam Jurnal Telaah Bisnis. Vol. 18. No. 1. Juli 2017.
- [10] Syukri, Makmur. Sitompul, Indrasyah. Banurea, Oda Kinata. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya. 2020).

- [11] Trihantoyo, Syunu. Manajemen Keuangan Pendidikan. (Surabaya: Pustaka Aksara. 2020)